



Artikel

Konflik Komunal pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat Tahun 1998

Fyna Roslah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
*E-mail: fiynaarr@gmail.com

Citation: Fyna Roslah. "Konflik Komunal Pada Peristiwa Ketapang Di Jakarta Pusat Tahun 1998". *Socio Historica* 2025, Vol. 4., No. 1. DOI: <https://doi.org/10.15408/sc.v4i1.43388>

Publisher's Note: Socio Historica stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract:

This study examines the communal conflict during the Ketapang Incident in Central Jakarta in 1998, which was part of the socio-political dynamics in the transitional Reformasi era. Ketapang is a relatively old residential area currently known as Jalan K.H. Zainul Arifin. The conflict began with tensions between local residents and gang members guarding a gambling site in the Ketapang area, which later escalated into mass riots involving ethnic and religious sentiments. The purpose of this study is to understand how the conflict occurred and its impacts during the Ketapang Incident of 1998. The study employs historical methods with sociological and anthropological approaches, analyzing the root causes of the conflict using Johan Galtung's ABC Conflict Triangle Theory, which includes attitudes, behavior, and contradictions. The findings indicate that the main contradiction lies in the social value differences between residents and gang members related to gambling, while hostile attitudes and violent behavior were the primary triggers for conflict escalation. This study also explores the social, economic, and psychological impacts of the conflict, as well as the resolution efforts involving religious leaders and the government. It is hoped that this study can enrich the understanding of communal conflicts in Indonesia and provide insights for future conflict resolution efforts.

Keywords: Communal conflict, Ketapang Incident, Reformasi 1998, and Conflict Triangle Theory.

Abstrak : Penelitian ini mengkaji konflik komunal pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat tahun 1998, yang merupakan bagian dari dinamika sosial-politik di era transisi Reformasi. Ketapang merupakan daerah pemukiman yang relatif tua yang saat ini dikenal dengan nama Jalan K.H. Zainul Arifin. Konflik ini berawal dari ketegangan antara warga lokal dan kelompok preman penjaga tempat perjudian di wilayah Ketapang, yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan massal bermuatan SARA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik dan dampak dari Peristiwa Ketapang 1998. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan pendekatan sosiologis dan antropologis, penelitian ini menganalisis akar konflik melalui teori Segitiga Konflik ABC Johan Galtung, yang mencakup sikap, perilaku, dan kontradiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontradiksi utama adalah adanya perbedaan nilai sosial antara warga dan kelompok preman terkait perjudian, sementara sikap permusuhan dan perilaku kekerasan menjadi pemicu utama eskalasi konflik. Penelitian ini juga mengungkap dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari konflik tersebut, serta upaya penyelesaiannya yang melibatkan tokoh agama dan pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang konflik komunal di Indonesia dan memberikan wawasan bagi upaya resolusi konflik di masa depan.

Kata kunci: Konflik komunal, Insiden Ketapang, Reformasi 1998, Teori Segitiga Konflik

1. Pendahuluan

Pada awal tahun 1998, Indonesia telah memasuki era Reformasi setelah lebih dari tiga puluh tahun di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Sebagai bagian dari upaya Bangsa dan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, Gerakan Reformasi 1998 merupakan bagian dari sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia.¹ Oleh karenanya, tahun 1998 menjadi salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia yang menandai sebuah babak baru yang penuh dengan peristiwa dramatis. Huru-hara pada tahun 1998 diawali dengan Insiden Trisakti di Jakarta pada 12 Mei 1998. Mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum berkumpul di jalanan untuk melakukan aksi demonstrasi memprotes kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi selama pemerintahan rezim Soeharto. Puncak peristiwa ini terjadi pada 21 Mei 1998, ketika Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya setelah mendapat tekanan masif dari masyarakat dan elite politik. Pasca kemunduran Soeharto, Indonesia kemudian dipimpin oleh B.J. Habibie dengan Kabinet Reformasinya. Kebebasan pers, pemilu yang bebas dan demokratis, dan pelepasan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah beberapa kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan hukum yang mewarnai pemerintahan era Reformasi.²

Berdasarkan sejarahnya, sebelum, menjelang, dan sesudah kejatuhan Soeharto telah terjadi berbagai kerusuhan sosial. Pada masa transisi setelah Mei 1998 kerap kali terjadi kerusuhan-kerusuhan yang menjadi bagian dari konflik sosial. Konflik adalah bagian dari realitas sosial dan merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sosial.³ Jakarta sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi di Indonesia telah menjadi saksi penting dari gelombang protes yang terjadi pada tahun 1998. Sejak peristiwa 21 Mei 1998, Jakarta dipenuhi dengan konflik komunal berupa tawuran yang seringkali berujung pada kerusuhan. *United Nations Support Facility for Indonesian Recovery* (UNSFIR) mengungkapkan bahwa kekerasan kolektif non-pemisahan (kekerasan kolektif yang tidak terkait dengan gerakan separatis) diperkirakan telah merenggut nyawa lebih dari 10.000 orang di Indonesia pada periode 1990-2003.⁴ Peristiwa Ketapang merupakan salah satu peristiwa yang terjadi karena adanya konflik komunal pada masa Reformasi di Jakarta. Peristiwa ini terjadi pada 21-22 November 1998. Wilayah Ketapang sekarang dikenal dengan Jalan K.H. Zainul Arifin yang terletak di Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Gerry van Klinken mengungkapkan bahwa Peristiwa Ketapang menjadi bagian dalam huru-hara komunal lokal karena insiden kekerasan terjadi dengan skala kota kecil yang berlangsung selama beberapa hari.⁵ Konflik komunal yang terjadi di Ketapang melibatkan warga Ketapang, preman (yang sebagian besar berasal dari Ambon) sebagai penjaga tempat perjudian, dan Front Pembela Islam (FPI).

Terjadinya konflik komunal pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat tahun 1998 berkaitan dengan pendirian tempat judi yang ada di daerah Ketapang atau lebih tepatnya di Jalan K.H. Zainul Arifin, Jakarta Pusat. Di Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 11, kawasan Ketapang berdiri tempat hiburan bola tangkas atau yang disebut dengan judi Mickey Mouse Enko. Mickey Mouse merupakan sebuah judi yang dikemas sebagai permainan bola tangkas. Dalam permainan bola tangkas ini pemain dijanjikan bonus

¹ Basuki Agus Suparno, *Reformasi Dan Jatuhnya Soeharto* (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2012), 1.

² Reyhan Ainun Yafi, "Kebijakan Historis BJ Habibie Berdampak Transformasi Menuju Demokrasi," *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* Vol. 4, No. 2. (2023): 66.

³ Nunik Esti Utami, "Nasionalisme Pemersatu Konflik Sosial di Indonesia (1996-1999)," *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah* Vol. 3, No. 2 (2017): 6.

⁴ Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal Dan Demokratisasi di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 6.

⁵ *Ibid*, 5.

tertentu kalau dia bisa menyusun angka tertentu.⁶ Tempat judi Mickey Mouse ini dijaga oleh *centeng* atau preman yang sebagian besarnya berasal dari suku Ambon.

Konflik ini bermula dari insiden kekerasan di sekitar tempat perjudian Mickey Mouse Enko yang dijaga oleh preman. Ketegangan meningkat ketika kelompok preman menyerang warga, yang memicu kerusuhan lebih luas. Konflik yang pada mulanya berawal dari sengketa warga, khususnya oleh sekelompok preman penjaga perjudian, akan tetapi meluas menjadi kerusuhan yang dianggap bermuatan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) karena adanya isu pembakaran rumah ibadah. Peristiwa ini menelan korban jiwa yang diduga adalah karyawan tempat judi bola tangkas di Jalan K.H. Zainul Arifin, Jakarta Pusat.⁷ Kerusuhan ini mengakibatkan kerugian materiil sebesar 9 Miliar. Peristiwa Ketapang ini mencatat satu Masjid Khairil Biqa, 22 gedung gereja, tiga gedung sekolah, mobil dan motor, serta puluhan gedung lainnya serta rumah-rumah warga yang telah dirusak dan dibakar.⁸ Selain kerugian materi, banyak nyawa yang hilang dalam Peristiwa Ketapang 1998 di Jakarta. Sebanyak 13 orang ditemukan tewas di dalam reruntuhan bekas kebakaran gedung yang menjadi tempat perjudian yang berdiri di Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 11, Jakarta Pusat.⁹

Gambaran mengenai Peristiwa Ketapang yang terjadi tahun 1998 telah diungkapkan dalam buku berjudul *Berbagai Peristiwa dan Penanganannya 1998-1999: Penculikan Trisakti, Semanggi, Ambon, Ketapang, Kupang, Banyuwangi, Sambas, Ciamis, Aceh* yang diterbitkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan pada tahun 1999.¹⁰ Buku ini berisikan gambaran Peristiwa Ketapang dan penanganannya dari perspektif TNI dan Polri yang pada saat itu dipimpin oleh Wiranto selaku Menteri Pertahanan Keamanan atau Panglima Tentara Nasional Indonesia. Akan tetapi, buku ini hanya memaparkan gambaran bagaimana terjadinya Peristiwa Ketapang berdasarkan perspektif pemerintah. Isi dari buku ini tidak menjelaskan situasi kondisi sosial, politik, ekonomi, dan aspek kesejarahan dari wilayah Ketapang itu sendiri. Maka dari itu, artikel ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana konflik komunal bisa terjadi dan dampak dari terjadinya konflik komunal pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat tahun 1998 dengan mengaitkannya kepada kondisi sosial, politik dan ekonomi pada tahun tersebut karena Peristiwa Ketapang ini mencerminkan dinamika konflik komunal yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik pada masa Reformasi tahun 1998. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi ruang kosong kajian sebelumnya sebagaimana yang telah disebut di atas.

⁶ Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam di Indonesia* (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), 533.

⁷ "Peristiwa Ketapang Sungguh Memprihatinkan," *Suara Pembaruan*, 23 November 1998.

⁸ "Daftar Korban Kerusuhan Ketapang," *Berita Buana*, 25 November 1998.

⁹ "Kerusuhan Ketapang 13 Tewas, 11 Gereja Dibakar Dan Dirusak," *Suara Pembaruan*, 22 November 1998.

¹⁰ Departemen Pertahanan dan Ketahanan, *Berbagai Peristiwa Dan Penanganannya 1998-1999: Penculikan Trisakti, Semanggi, Ambon, Ketapang, Kupang, Banyuwangi, Sambas, Ciamis, Aceh*, 37-38.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang melibatkan empat tahapan, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah).¹¹ Sumber primer pertama berupa dokumen arsip dari Forum Kerukunan Warga Ketapang tahun 1998 berjudul *Kronologi Kerusuhan Ketapang* yang membahas secara kronologis Peristiwa Ketapang 1998 berdasarkan sudut pandang warga Ketapang. Sumber primer ketiga berupa hasil wawancara dengan 3 narasumber dari warga Ketapang dan 1 narasumber selaku wakil ketua Mahkamah Front DPP Front Pembela Islam (FPI) tahun 2023 dan pada tahun 1998 beliau menjadi Ketua Badan Intelijen FPI. Keempat narasumber tersebut adalah para aktor yang mengetahui dan menyaksikan Peristiwa Ketapang tahun 1998. Selain wawancara, ditemukan juga foto-foto saat terjadi dan pasca Peristiwa Ketapang yang diterbitkan oleh datatempo.co.¹²

Penelitian ini juga merujuk kepada beberapa sumber sezaman sebagai sumber yang melengkapi sumber primer di atas, yaitu surat kabar sezaman *Berita Buana*,¹³ *Jawa Pos*,¹⁴ *Media Indonesia*,¹⁵ *Suara Pembaruan*.¹⁶ Selain surat kabar, penelitian ini juga merujuk pada *Majalah Islam Sabili* dengan judul "Tragedi Ketapang SARA Lagi DARAH Lagi Sampai Kapan...?" edisi 9 Desember 1998,¹⁷ *Majalah Tempo* dengan judul "Amuk SARA Apa Targetnya" edisi 8-14 Desember 1998,¹⁸ dan *Tabloid Mingguan Adil* dengan judul "Targetnya Hanya Preman Ambon" edisi 2-8 Desember 1998.¹⁹ yang didapatkan dari Perpustakaan Nasional RI di Salemba. Untuk sumber sekunder, penulis menemukan buku-buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian yakni penyebab terjadinya konflik komunal pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat tahun 1998 dari Pusat Informasi Kompas (PIK) di kawasan Palmerah dan Perpustakaan Komnas Perempuan di kawasan Menteng. Tak hanya buku, penelitian ini juga memperoleh jurnal artikel yang didapatkan melalui google scholar.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan antropologis. Dalam pandangan Sartono, konflik komunal sering kali mencerminkan perubahan atau ketegangan dalam struktur sosial. Ini dapat mencakup konflik antara kelas sosial, kelompok etnis, atau antar agama. Perubahan sosial secara inheren juga mencakup transformasi struktural pada sistem produksi, sistem sosial, dan politik. Analisis historis yang memakai perspektif struktural hanya bisa dilakukan dengan pertolongan ilmu sosial khususnya sosiologi.²⁰ Dengan cara ini, pendekatan sosiologis membantu mengungkapkan lapisan-lapisan kompleksitas yang sering kali tersembunyi di balik konflik komunal seperti Peristiwa Ketapang 1998, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang penyebab dan dinamika konflik tersebut.

Selain pendekatan sosiologis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologis. Antropologis mengkaji suatu komunitas dengan pendekatan sinkronis, yaitu seperti

¹¹ M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenada, 2014), 219.

¹² Tempo Data Science, "Kerusuhan Ketapang," n.d., accessed 1 Maret 2024, <https://www.datatempo.co>.

¹³ "Pemicu Kerusuhan Itu Permainan Berhadiah 'Rokok'," *Berita Buana*, 25 November 1998.

¹⁴ "Preman-Warga Bentrok, 6 Tewas," *Jawa Pos*, November 23, 1998.

¹⁵ "Enam Orang Tewas Tujuh Gereja Dibakar, Jakarta Pusat Rusuh," *Media Indonesia*, 23 November 1998.

¹⁶ "Kerusuhan Melanda Jl. Zainul Abidin, Jakpus," *Suara Pembaruan*, 22 November 1998.

¹⁷ "Tragedi Ketapang SARA Lagi DARAH Lagi Sampai Kapan...?," *Majalah Islam Sabili*, 9 Desember 1998.

¹⁸ "Amuk SARA Apa Targetnya," *Tempo*, 14 Desember 1998.

¹⁹ "Targetnya Hanya Preman Ambon," *Tabloid Mingguan Adil*, 8 Desember 1998.

²⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 145-147.

membuat suatu pemotretan pada momentum tertentu mengenai berbagai bidang atau aspek kehidupan komunitas sebagai bagian dari suatu kesatuan atau sistem serta hubungan satu sama lain sebagai subsistem dalam suatu sistem.²¹ Melalui pendekatan antropologis, penelitian ini tidak hanya melihat peristiwa Ketapang sebagai rangkaian kejadian, tetapi juga sebagai manifestasi dari dinamika sosial, budaya, dan identitas yang lebih dalam. Dengan kedua pendekatan tersebut, artikel ini berfokus mengkaji gambaran umum wilayah Ketapang dan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan akar masalah konflik komunal antara warga Ketapang dan preman serta keterlibatan FPI (Front Pembela Islam) pada Peristiwa Ketapang yang terjadi di Jakarta Pusat tahun 1998.

Penelitian ini menggunakan teori konflik segitiga ABC yang diungkapkan oleh Johan Galtung. Johan Galtung menyatakan pendapatnya bahwa *konflik* = sikap/asumsi + perilaku + kontradiksi/isi. Dengan kata lain, konflik adalah konstruk segitiga. Jika diurutkan, yaitu A–B–C atau jika diurutkan artinya A (*attitude/sikap*), B (*behavior/perilaku*), dan C (*contradiction/kontradiksi* atau pertentangan).²² Ketiga komponen ini disebut sebagai segitiga ABC oleh Johan Galtung karena ketiga komponen tersebut menjadi masalah/konflik dalam realitas kehidupan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teori konflik Johan Galtung yang disebut sebagai teori konflik segitiga ABC, yaitu: *Contradiction*, yang merupakan pertentangan yang kuat dan tajam yang muncul selama konflik. Ini biasanya merupakan akar atau sumbu dari terjadi suatu konflik. *Attitude*, yang merupakan cara pihak yang tengah mengalami konflik dalam pikiran dan merasakan bahwa mereka berseteru dengan pihak atau kelompok yang lain. *Behavior*, yang merupakan suatu ekspresi dari konflik yang tengah terjadi baik secara fisik dan lisan. Sikap dan persepsi yang saling bertolak belakang atau kontradiksi sangat mungkin mempengaruhi perilaku dan tindakan yang terjadi selama konflik interpersonal.²³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sejarah Singkat Wilayah Ketapang, Jakarta Pusat

Jika dilihat dari sejarahnya, Ketapang merupakan daerah pemukiman yang relatif tua. Nama Gang Ketapang (sekarang Jalan K.H. Zainul Arifin), disebut dalam tulisan sejarah kolonial pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch paruh pertama abad ke-19.²⁴ Nama-nama gang tersebut biasanya diambil dari nama orang, tempat, atau fungsi tertentu, dan beberapa di antaranya masih digunakan hingga saat ini. Berdasarkan pemaparan salah satu warga Ketapang, penyebutan nama Gang Ketapang itu sendiri dikarenakan sejak zaman Hindia Belanda di daerah tersebut banyak ditumbuhi pohon Ketapang.²⁵ Wilayah Ketapang merupakan sebutan untuk daerah yang terletak di Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pergantian nama wilayah Ketapang Jakarta Pusat menjadi Jalan K.H. Zainul Arifin Jakarta Pusat memiliki sejarah yang terkait dengan perubahan nama jalan yang diambil dari nama seorang tokoh penting di Indonesia.

Sejarah yang paling terkenal mengenai Gang Ketapang adalah berdirinya sebuah pabrik gas pertama di Batavia. Pada foto udara Batavia (Jakarta) ini, di bagian tengah bawah terlihat pabrik gas yang terletak di sepanjang Gang Ketapang. Jalan tersebut berlanjut ke arah Sawah Besar setelah persimpangan dengan jalan diagonal yang melintasi foto ini,

²¹ Ibid, 153.

²² Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian Dan Konflik Pembangunan Dan Peradaban* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 160.

²³ Ali Mursyid Azisi, "Studi Komparatif Teori Konflik Johan Galtung Dan Lewis A. Coser," *Jurnal Yaqzan* 7, No. 2 (2021): 224–225.

²⁴ Ketapang Beragam Etnik Yang Menyatu," *Kompas*, 4 Desember 1998.

²⁵ Saefudin, Wawancara "Sejarah Ketapang," 11 Agustus 2024.

yaitu *Molenvliet*, yang di sisi kanan atas mengarah ke *Harmonieplein* (sekarang dikenal sebagai kawasan sekitar Jalan Majapahit dan sekitarnya). Gedung *Societeit Harmonie* (tempat perkumpulan orang Belanda) tidak terlihat dalam foto ini, namun *Hotel des Galeries* dapat terlihat dengan jelas, dan lebih ke atas terlihat istana Gubernur Jenderal di Rijswijk (sekarang Jalan Veteran). Jalan di bagian atas foto, tepat di tengah dengan bentuk sudut, adalah Jalan Sukarjo Wiryopranoto yang ada sekarang.²⁶

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk telah lama dirintis, yaitu sejak tahun 1859 semasa pemerintahan Hindia Belanda. Pada awal berdirinya PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk adalah sebuah perusahaan berbadan hukum firma L.J.N. Eindhoven & Co. Gravenhage. Firma ini mendapat konsesi untuk mendirikan pabrik gas di Batavia, berdasarkan kebutuhan akan gas yang digunakan untuk mengisi lampu pijar di Batavia. Izin diberikan oleh *Ministre van Koloniën* (Menteri urusan tanah jajahan). Firma hukum adalah firma satu-satunya yang diberikan izin, sehingga monopoli sangat terasa. Pada periode pertengahan kedua abad 19, proses industrialisasi telah berkembang. Tahun 1860, perusahaan-perusahaan kecil mulai mendapatkan posisinya, sehingga status perusahaan berubah menjadi *Naamloze Venoetschap* (NV). Perubahan status ini juga terjadi di tubuh Firma L.J.N. Eindhoven, sehingga firma ini berubah nama menjadi *NV Nederlandsch Indische Gas Maatschappij* (NIGM).

NV NIGM bertahan hingga tahun 1940/1941, ketika perusahaan menghadapi masa sulit akibat dampak Perang Dunia II. Perang ini menyebabkan hambatan komunikasi antara tanah jajahan dan Belanda, yang saat itu diduduki oleh Jerman. Kesulitan ini akhirnya mempengaruhi posisi Belanda, yang kemudian menyerah kepada Jepang. Di masa pendudukan Jepang, perusahaan gas diambil alih oleh pemerintah pendudukan Jepang. Dampak dari peralihan tersebut adalah terjadi banyak kekerasan terhadap kaum pekerja. Produksi gas dipacu tanpa melihat kesejahteraan buruh atau tenaga kerja. Setelah masa perang dengan Jepang berakhir, perusahaan gas diambil alih oleh bangsa Indonesia. Pada 3 Mei 1950, nama NV NIGM diubah menjadi *NV Overzeesche Gas en Electriciteit Maatschappij* (NV OGEM).²⁷



Gambar 1 Gasfabriek aan Gang Ketapang te Batavia

²⁶ Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaartmaatschappij (KNILM) Fotostudio, "Luchtfoto van Batavia," 1940 1930, accessed 24 Agustus 2024, <https://collectie.wereldmuseum.nl/#/query/a76b414a-654c-44f2-a4e6-6f12903b825b>.

²⁷ ANRI, *Arsip Tekstual PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK (PBN) (1950) 1961-2008: Akta Perubahan NV Nederlandsch Indische Gas Maatschappij (NV NIGM) Menjadi NV Overzeesche Gas En Electriciteit Maatschappij (NV OGEM)*, Jakarta, 1950, Nomor Inventaris RA. 82, 2.

Sumber: KITLV (<http://hdl.handle.net/1887.1/item:790890>)

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan dan mengubah namanya menjadi Perusahaan Gas Negara (PGN), yang kemudian diubah lagi pada tahun 1965 menjadi Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara. Pabrik Gas Ketapang akhirnya ditutup setelah ditemukan dan dikembangkannya *Liquid Petroleum Gas* atau yang disingkat Elpiji untuk konsumsi rumah tangga.²⁸ Setelah resmi menjadi Perusahaan Gas Negara pada 13 Mei 1965, memasuki tahun 2018, PGN menjadi Subholding Gas PT Pertamina (Persero) sampai dengan saat ini.²⁹

3.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi Wilayah Ketapang, Jakarta Pusat

Pada tahun 1998, DKI Jakarta memiliki populasi yang signifikan dan dinamis. Menurut data dari BPS Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 1998, populasi Jakarta mencapai sekitar 8,3 juta orang. Jika dilihat dari angka tersebut, Jakarta merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dan memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat. Dengan luas yang hanya mencapai 661,52 km², kepadatan di DKI Jakarta pada tahun 1990 mencapai 12.466 jiwa per km² meningkat menjadi 13.882 jiwa pada tahun 1995 dan tahun 1998 diperkirakan mencapai 14.345 jiwa per km².³⁰ Wilayah Ketapang atau sekarang dikenal sebagai Jalan K.H. Zainul Arifin merupakan jalan yang termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1227 Tahun 1989 tanggal 8 Desember 1989 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan DKI Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986 tanggal 29 Februari 1986 tentang Pemecahan, Penyatuan, Penetapan Batas, Pembaharuan Nomor Kelurahan di DKI Jakarta, maka luas wilayah Kelurahan Petojo Utara terdapat 111,84 Ha dengan 8 RW yang terdiri dari 99 RT serta dengan batas sebelah Utara merupakan Jalan K.H. Zainul Arifin.³¹

Secara demografis, kawasan Ketapang merupakan bagian dari Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, dan Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir. Wilayah ini dipadati dengan aktivitas bisnis serta perumahan, mencakup berbagai fasilitas seperti sekolah, pusat bisnis, klinik, vihara, serta toko-toko obat. Jalan K.H. Zainul Arifin merupakan salah satu jalan utama di Jakarta Pusat yang menghubungkan beberapa lokasi penting, dan menjadi jalur strategis untuk transportasi umum seperti TransJakarta dan KRL.³² Wilayah Jakarta Pusat, termasuk Ketapang yang menjadi bagian Kelurahan Petojo Utara merupakan zoning administrasi pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Selain terdapat kantor-kantor pemerintahan yang berada di sepanjang jalan MH. Thamrin, Istana Negara, di sana juga terdapat pusat-pusat perbelanjaan. Namun, di samping itu terdapat pula daerah permukiman yang padat penduduk.³³ Area ini juga memiliki kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi karena letaknya yang dekat dengan pusat perbelanjaan dan area bisnis seperti Plaza Gajah Mada. Jalan K.H. Zainul Arifin berdekatan dengan Jalan Gajah Mada dan Jalan Sukarjo Wiryopranoto.

Mengitari jalan-jalan di wilayah Kelurahan Petojo Utara, tempat dimana Peristiwa Ketapang bermula, impresi yang didapat adalah kawasan tersebut merupakan daerah

²⁸ Zeffry Alkatiri, *Jakarta Punya Cara* (Jakarta: Masup Jakarta, 2012), 15-17.

²⁹ <https://pgn.co.id/tentang-kami>, accessed 24 Agustus 2024.

³⁰ BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta 1998* (Jakarta: BPS Propinsi DKI Jakarta, 1999), 6.

³¹ <https://www.petojoutara.com/content/tentang.>, accessed 24 Agustus, 2024.

³² Wikipedia, "Jalan Kyai Haji Zainul Arifin (Jakarta)," 2022, accessed 24 Agustus 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Kyai_Haji_Zainul_Arifin_%28Jakarta%29.

³³ Elsa Martini, "Perkembangan Kota Menurut Parameter Kota Studi Kasus: Wilayah Jakarta Pusat," *Jurnal Planesa* Volume 2, Nomor 2 (November 2, 2011): 131.

yang terbuka. Di sana berbaur manusia-manusia Jakarta dari berbagai suku, ras, dan agama. Pekerjaan dan peringkat sosial-ekonomi mereka pun beragam, mulai dari pengusaha kaya sampai keluarga prasejahtera. Artinya, tidak homogen sebagaimana kondisi umum di sejumlah kompleks perumahan baru. Warganya berasal dari strata sosial-ekonomi yang kurang lebih sama. Beberapa pengembang, meski mungkin tanpa sadar, bahkan telah menciptakan kompleks-kompleks perumahan yang hanya layak dihuni oleh golongan etnik tertentu.³⁴

Pada tahun 1998 wilayah Ketapang telah ditinggali oleh berbagai macam golongan etnik dan agama. Berdasarkan penuturan Kepala Urusan Pemerintah Kantor Kelurahan Petojo Utara tahun 1998 bernama Hamdani, dari total 21.623 jiwa warga di kelurahannya, kurang lebih 33 persen adalah orang Jawa, 30 persen warga keturunan Tionghoa, 15 persen orang-orang Betawi, 15 persen orang Sunda, 5 persen orang Banten, dan sisanya sekitar 2 persen adalah warga keturunan Arab. Jumlah warga beragama Islam 16.745 jiwa, Kristen Katolik 3.018 jiwa, Budha 825 jiwa, Kristen Protestan 130 jiwa, dan Hindu 12 jiwa.³⁵

Dalam kehidupan sosialnya, warga wilayah Ketapang mempunyai tradisi yang berulang setiap Lebaran, Natal atau upacara agama lainnya. Mereka yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu terbiasa untuk saling datang bersilaturahmi ke rumah tetangga-tetangganya yang merayakan upacara keagamaan guna menjalin kerukunan kehidupan beragama. Menurut penuturan warga sekitar, salah satunya Maulana yang merupakan Ketua Pengurus Masjid Khairil Biqa di Jalan Pembangunan I Dalam, tradisi ini telah lama berlangsung dan tidak diketahui kapan kebiasaan itu dimulai karena sejak ia kecil kebiasaan itu sudah ada.³⁶

Kelurahan Petojo Utara dkitari dan dibelah jalan-jalan besar, seperti Jalan Gajah Mada, Jalan K.H Zainul Arifin, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Jalan Suryopranoto, dan Jalan Cideng Timur yang di tepi jalan-jalan tersebut berdiri berbagai bangunan kantor, pusat perbelanjaan, dan bangunan komersial lainnya. Kawasan pemukiman berada di balik deretan gedung-gedung itu, termasuk gedung Gajah Mada Plaza di Jalan Gajah Mada. Berdirinya gedung ini menambah kompleksitas kehidupan sosial-ekonomi di sana. Pada akhir 1990-an, wilayah Ketapang adalah daerah dengan karakter sosial ekonomi yang kompleks. Sebagai salah satu bagian dari pusat kota, Ketapang menjadi tempat bertemunya beragam kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya, agama, dan ekonomi yang berbeda. Daerah ini dikenal sebagai kawasan padat penduduk dengan sebagian besar warganya bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pekerja kasar, dan usaha kecil.³⁷

Secara perekonomian, warga keturunan Tionghoa dan Arab menempati posisi sosial-ekonomi lebih baik. Rata-rata warga keturunan Tionghoa dan Arab ini tinggal di rumah-rumah di tepi jalan utama wilayah Kelurahan Petojo Utara, seperti Jalan Pembangunan I dan II, serta Jalan Alaydrus. Sementara warga lainnya, termasuk orang-orang Betawi, bermukim 'di dalam', di jalan-jalan atau gang-gang yang lebih kecil di balik rumah-rumah besar dan bangunan-bangunan komersial. Secara umum, warga keturunan Tionghoa di wilayah Ketapang adalah karyawan swasta atau pedagang. Sedangkan warga keturunan Arab banyak menguasai tanah dan rumah, serta memiliki

³⁴ Ibid.

³⁵ Ketapang Beragam Etnik Yang Menyatu," *Kompas*, 4 Desember 1998.

³⁶ Ibid.

³⁷ Jhohan, Wawancara "Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Ketapang," 5 Agustus 2024.

bisnis penyewaan rumah atau kamar untuk kos bagi karyawan. Sebagian lagi jadi pedagang garmen dan tekstil di Pasar Tanah Abang. Sementara warga dari suku-suku lain pekerjaannya bervariasi, ada pegawai negeri, pegawai swasta, anggota ABRI, pengusaha, sampai pedagang kecil dan buruh kasar. Menurut penuturan salah satu warga, H. Maulana Sani, variasi status sosial-ekonomi ini tak pernah memunculkan kecemburuan sosial.³⁸ Meskipun ada perbedaan status sosial-ekonomi, wilayah Ketapang tetap dikenal sebagai komunitas yang harmonis tanpa adanya kecemburuan sosial yang signifikan, menunjukkan ketahanan dan kohesi sosial yang kuat di tengah dinamika kota besar.

3.3. Latar Belakang dan Faktor-Faktor Penyebab Konflik Komunal Pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat

Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia pada saat itu tak luput dari kerusuhan-kerusuhan atau peristiwa-peristiwa yang bermuatan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Khusus Jakarta tantangan yang dihadapi semakin berat karena situasi sosial telah menunjukkan adanya perubahan drastis pada sikap masyarakat, yang agresif sering tidak lagi mengindahkan aturan dan tidak mampu lagi menahan diri.³⁹ Kerusuhan-kerusuhan tersebut dapat terjadi karena adanya kemiskinan, rendahnya pendidikan, munculnya sumbu di kelas bawah yang dipicu oleh aparat keamanan dan ketertiban yang diskriminatif, serta adanya krisis ekonomi, provokasi, dan pemberian uang bayaran yang diberikan kepada aktor pemicu konflik.⁴⁰

Salah satu huru-hara komunal lokal yang telah terjadi di Indonesia adalah adanya konflik komunal pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat tahun 1998. Peristiwa Ketapang yang terjadi di Jakarta Pusat merupakan bagian dari serangkaian kekerasan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Latar belakang konflik komunal pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat tahun 1998 ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan ekonomi Indonesia pada akhir era Orde Baru. Setelah kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998, kerusuhan-kerusuhan lain mulai bermunculan di Jakarta pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Sebelum terjadinya Peristiwa Ketapang, pada 11-13 November 1998, terjadi Peristiwa Semanggi. Peristiwa ini berkaitan dengan Sidang Istimewa MPR tahun 1998 yang berlangsung pada tanggal 10-13 November 1998 untuk membahas tentang pelaksanaan Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 1999.⁴¹ Setelah delapan hari terjadinya Peristiwa Semanggi pada 21-22 November terjadilah konflik komunal pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat, yang pada mulanya berawal dari sengketa warga, khususnya oleh sekelompok preman penjaga peradilan, akan tetapi meluas menjadi kerusuhan yang dianggap bermuatan SARA karena adanya isu pembakaran rumah ibadah. Berdasarkan hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa pada tahun 1998 ini masyarakat sedang mengalami apa yang disebut frustrasi sosial dikarenakan ketidakstabilan sosial, politik, dan ekonomi yang dialami pada masa Reformasi ini. Dalam hal ini, pemerintah (tidak hanya rezim Soeharto tapi juga rezim Habibie) punya andil dalam menciptakan frustrasi sosial yang menghinggapi sebagian besar bangsa Indonesia. Frustrasi sosial ini pun semakin subur ketika budaya kekerasan dan lemahnya penegakan hukum menjadi tontonan sehari-hari.⁴²

³⁸ Ketapang Beragam Etnik Yang Menyatu," *Kompas*, 4 Desember 1998.

³⁹ "Jakarta 'Tercabik' Oleh Kerusuhan Mei Dan November," *Media Indonesia*, 30 November 1998.

⁴⁰ Agus Budi Permono dkk, *Peta Konflik Jakarta: Warga, Mahasiswa, Preman, Suku, Negara, Dan Warga* (Jakarta: YAPPIKA, 2004), 1.

⁴¹ Himpunan Mahasiswa Sejarah UNDIP, "22 Tahun Tragedi Semanggi I, Pelanggaran HAM Yang Harus Dituntaskan," n.d., accessed 10 September 2024, <https://hmsejarah.fib.undip.ac.id/12-tahun-tragedi-semanggi-i-pelanggaran-ham-yang-harus-dituntaskan/>.

⁴² Trimedya Panjaitan, "Insiden Ketapang Dan Runtuhnya Wibawa Hukum," *Berita Buana*, 30 November 1998.

Frustrasi sosial yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia mencerminkan akumulasi kekecewaan, ketidakpuasan, dan kemarahan masyarakat terhadap berbagai kondisi buruk yang dihadapi selama bertahun-tahun. Di tengah kondisi tersebut, budaya kekerasan yang berkembang dan lemahnya penegakan hukum menambah rasa tidak aman di masyarakat. Kekerasan menjadi hal yang lazim, baik dalam bentuk konflik horizontal seperti kerusuhan komunal maupun kekerasan negara terhadap rakyat. Semua ini menciptakan kondisi psikologis dan sosial yang mendorong masyarakat untuk meluapkan frustrasi melalui protes, demonstrasi, dan terkadang, aksi anarkis. Frustrasi sosial ini menggambarkan betapa mendalamnya krisis multidimensi yang dialami bangsa Indonesia pada saat itu.⁴³

Berangkat dari frustrasi sosial di atas, kebebasan dan kemerdekaan pers menjadi penting karena berkaitan erat dengan terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1998. Masa Reformasi ini telah melahirkan Permenpen No. 01/Per/1998 yang diterbitkan sebagai pengganti Permenpen No. 01/Per/1984 tentang kebijakan sensor dan pelebagaan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) yang mengekang bagi pemberhentian Pers yang berseberangan dengan penguasaan.⁴⁴ Lahirnya Permenpen ini mempermudah prosedur pengajuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), sehingga jumlah media cetak dan elektronik pun mengalami peningkatan pesat pada tahun 1998. Namun, euforia kebebasan pers pada periode tersebut tidak sepenuhnya bebas dari masalah. Dalam berbagai peristiwa antara 1998-2002, pers kerap terjebak dalam situasi pro dan kontra, yang memicu reaksi yang dirugikan oleh pemberitaan media.⁴⁵

Dari kejadian-kejadian yang memuncak pada media Mei'98 dan kemudian terulang-ulang lagi, sekalipun konteksnya berbeda-beda, dapat disimpulkan bahwa masyarakat mudah berubah menjadi massa yang sangat sensitif, emosional serta peka terhadap isu dan provokasi.⁴⁶ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hal yang melatar belakangi konflik komunal Pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat ini dikarenakan warga Jakarta sedang mengalami dekadensi moral yang cukup serius dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu ditandai dengan munculnya tindakan anarki, kekerasan, serta kriminalitas yang menonjol menyertai demonstrasi yang digulirkan mahasiswa dalam rangka menuntut reformasi dan adanya kebebasan pers yang pro dan kontra dalam memberitakan berbagai isu pada tahun 1998.⁴⁷ Selain itu, tentu saja ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya konflik komunal pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat tahun 1998

Konflik komunal merupakan sebuah bentuk konflik yang terjadi di dalam masyarakat yang mendiami lokasi tertentu, biasanya melibatkan kelompok-kelompok dengan identitas yang berbeda, seperti etnis, agama, atau budaya. Setiap konflik yang bersifat komunal antara kelompok-kelompok dalam masyarakat mengikuti garis-garis asal-usul etnis atau agama, tidak secara eksplisit tentang kelas, dan tidak menentang negara. Huru-hara komunal lokal ini dapat berupa insiden kekerasan yang terjadi dengan skala kota kecil atau kota besar yang berlangsung selama beberapa hari.⁴⁸

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Metalianda, "Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* Vol. 1, No. 1 (2017): 78.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ "Kerusuhan Yang Bernuansa SARA Menunjukkan Pekanya Kondisi Masyarakat," *Kompas*, 24 November 1998.

⁴⁷ "Gubernur Sutiyoso: Warga Alami Dekadensi Moral," *Kompas*, 23 November 1998.

⁴⁸ Gerry Van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal Dan Demokratisasi di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 4-5.

Johan Galtung mengungkapkan bahwa konflik adalah konstruk segitiga. Maka Konflik adalah tentang kehidupan, yang menunjuk langsung pada kontradiksi-kontradiksi sebagai menciptakan kehidupan dan menghancurkan kehidupan. Konflik adalah sikap/asumsi, perilaku, dan kontradiksi/isi. Oleh karenanya, ketiganya secara bersama-sama membentuk segitiga konflik ABC. Segitiga ini dapat digunakan untuk melacak dan mengidentifikasi arus konflik yang dimulai dari mana pun. Teori ini dirancang untuk memahami struktur konflik secara menyeluruh dan mengidentifikasi faktor penyebab kekerasan baik langsung maupun tidak langsung.⁴⁹ Adapun analisis konflik komunal yang terjadi pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat tahun 1998 berdasarkan tiga komponen utama dalam teori konflik segitiga ABC Johan Galtung yaitu: *attitude* (sikap), *behavior* (perilaku), *contradiction* (kontradiksi).

Kontradiksi dalam konflik ini adalah akar konflik yang melibatkan perbedaan kepentingan atau tujuan antara pihak-pihak yang berseteru. Dalam konflik komunal pada Peristiwa Ketapang 1998, kontradiksi muncul dari beberapa faktor: pertama **berdirinya tempat perjudian**. Konflik bermula dari pendirian tempat perjudian di wilayah Ketapang yang bersebelahan dengan pemukiman warga. Kehadiran perjudian ini, yang dilindungi oleh kelompok preman, menciptakan ketegangan dengan warga lokal yang mayoritas beragama Islam dan merasa terganggu oleh aktivitas perjudian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial mereka. Sebuah tempat hiburan bola tangkas alias judi Mickey Mouse Enko berdiri di Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 11, kawasan Ketapang, Jakarta Pusat.

Perkembangan judi di DKI Jakarta pada saat itu memang tengah merajalela. Usaha judi yang berkedok ketangkasan semula memang banyak tersebar di sepanjang Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, di daerah Lokasari, dan Glodok Jakarta Kota. Sudah bertahun-tahun pengelolanya mengoperasikan permainan tersebut dengan iming-iming hadiah berupa rokok. Maka dari itu, izin permainan bola ketangkasan tersebut dikeluarkan Dinas Pariwisata dan Tramtib DKI Jakarta karena masih dikategorikan sebagai arena hiburan masyarakat dan tidak ada unsur judi.⁵⁰ Namun, dibalik semua itu, permainan bola ketangkasan sejenis *dingdong* ini berubah menjadi arena judi. 'Rokok' yang menjadi hadiah dalam permainan bola ketangkasan ini hanyalah kedok, karena yang dimaksud dalam hadiah rokok tersebut dapat ditukarkan dengan uang jika pemain dapat menyelesaikan *game* yang ditentukan oleh mesin *amusement*. Dalam mesin *amusement* tersebut terdapat satu jenis permainan (bola tangkas) yang dimana pemain dijanjikan bonus tertentu apabila pemain dapat menyusun angka tertentu. Bisa kelipatan 100 dari pasangan, bisa kelipatan 500, bisa 40, bisa 50, 5, 3 maupun kelipatan 1.⁵¹

Usaha permainan ini menjanjikan keuntungan yang besar, sehingga dibangunlah sebuah kompleks permainan bola ketangkasan berlantai lima di Jalan K.H. Zainul Arifin, Ketapang Jakarta Pusat pada tahun 1997. Sebelum dibangun sebagai gedung permainan bola ketangkasan atau judi, dulunya lokasi tersebut merupakan gedung Perum Pegadaian Cabang Ketapang. Pengelola tempat judi Mickey Mouse Enko ini dikelola oleh WNI keturunan Cina.⁵² Menurut salah seorang warga setempat Suparman, pengelola

⁴⁹ Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian Dan Konflik Pembangunan Dan Peradaban*, 160–161.

⁵⁰ "Pemicu Kerusuhan Itu Permainan Berhadiah 'Rokok'," *Berita Buana*, 25 November 1998.

⁵¹ "Mesin Ketangkasan Judi?," *Suara Karya*, Mei 1989.

⁵² "Pemicu Kerusuhan Itu Permainan Berhadiah 'Rokok'," *Berita Buana*, 25 November 1998.

Gedung permainan bola ketangkasan berhasil memindahkan (*ruislag*) Gedung Perum Pegadaian Cabang Ketapang itu ke tempat lain yang lokasinya tidak jauh dan sudah mendapat izin dari beberapa instansi terkait, termasuk Dinas Pariwisata dan Tramtib DKI Jakarta. Karyawan tempat permainan ketangkasan ini mengungkapkan bahwa tempat judi berkedok tempat hiburan ini beroperasi selama 24 jam. Ini terbukti dari kendaraan yang parkir di halaman arena permainan tersebut yang rata-rata adalah mobil mewah, seperti BMW dan Mercedes. Kerap kali mobil-mobil mewah tersebut diparkir di pinggir jalan dan bahkan sebelumnya banyak mobil yang diparkir di pertokoan Ketapang, yang lokasinya di seberang jalan dari arena permainan bola ketangkasan. Namun, karena pengelola gedung perkantoran tidak mengizinkan, terpaksa para pemain bola ketangkasan itu memarkirkan mobilnya di pinggir jalan.⁵³

Berkaitan dengan lahan parkir ini, beberapa warga kerap kali terlibat cekcok soal jatah parkir dengan penjaga keamanan tempat hiburan bola tangkas Mickey Mouse Enko di Jalan K.H. Zainul Arifin 11, Jakarta Pusat.⁵⁴ Setelah berdiri selama setahun, tempat judi ini pun menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya konflik komunal pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat tahun 1998 yang bermula dari adanya perselisihan antar warga Ketapang dengan para preman penjaga tempat perjudian tersebut. Selain adanya keberadaan perjudian, kontradiksi ini juga terjadi karena adanya ketimpangan sosial dan ekonomi. Sebagian besar warga Ketapang adalah masyarakat kelas bawah yang tinggal di kawasan padat penduduk. Mereka bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima atau pekerja kasar, sementara kelompok preman dan pengelola perjudian memiliki akses ekonomi yang lebih baik. Penjagaan tempat perjudian ini juga hanya melibatkan orang-orang dari Ambon, sedangkan warga sekitar tidak dilibatkan.⁵⁵ Perbedaan dalam akses terhadap sumber daya ini menambah ketegangan yang berkontribusi pada konflik.

Perselisihan antara warga ketapang dengan preman penjaga tempat perjudian menjadi kontradiksi kedua dalam konflik ini. Fenomena preman menjadi lebih marak berada di kota-kota besar. Hal tersebut selain karena tingginya daya saing di perkotaan dengan jumlah penduduk yang padat menyebabkan angka pengangguran yang tinggi. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, merupakan "wilayah subur" bagi para pendatang dari daerah. Kehadiran mereka yang pada akhirnya tidak dapat tertampung dalam sektor pekerjaan formal mengakibatkan munculnya praktek-praktek preman untuk sekedar menyambung hidup, dan pada akhirnya menambah persoalan-persoalan kriminalitas yang semakin tinggi. Ulah para preman, preman pasar atau terminal-terminal, atau pasukan-pasukan pengaman yang dibentuk oleh berbagai organisasi yang justru memunculkan premanisme baru, telah mengganggu ketentraman, ketidaknyamanan serta keresahan di tengah masyarakat. Hal tersebut tidak saja berekses pada perekonomian nasional, tetapi akan berimplikasi pada konflik horizontal yang akan membahayakan keutuhan Negara.⁵⁶

Keterlibatan antara preman dan konflik komunal yang terjadi pada peristiwa ini dikarenakan tempat permainan ketangkasan atau judi Mickey Mouse tersebut dijaga oleh para *centeng* atau preman yang berasal dari suku Ambon (sebagian lagi dari kalangan Batak dan Timor-Timur). Perselisihan antara warga Ketapang dengan para

⁵³ Ibid.

⁵⁴ "Api Bermula dari Ketapang," *Tempo*, 23 November 1998.

⁵⁵ Jhohan, Wawancara "Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Ketapang," 5 Agustus 2024.

⁵⁶ Maruli CC. Simanjuntak, *Preman-Preman Jakarta* (Jakarta: Grafika Indah, 2007), v.

preman penjaga tempat perjudian bermula dari adanya perebutan lahan parkir oleh warga kawasan Ketapang yang tinggal di Jalan Pembangunan yang berada di belakang tempat judi, mereka merasa terganggu oleh kehadiran tempat permainan ketangkasan alias judi tersebut.⁵⁷ Kemudian puncaknya pada 21 November malam hari seorang pemuda yang merupakan warga Ketapang, Irfan dipukul oleh para preman tempat perjudian ketika melintasi tempat perjudian ini. Ia tengah berjalan menuju rumahnya di Ketapang dan melewati tempat judi tersebut. Para preman yang tengah berkumpul di depan tempat judi tiba-tiba menyenggol Irfan yang tengah berjalan dan memukulnya tanpa alasan. Ketua RW setempat datang meleraikan dan pihak pengelola Enko yang merupakan WNI keturunan Cina pun bersedia berdamai serta menanggung seluruh biaya pengobatan Irfan dan ayahnya di rumah sakit. Permasalahan ini pun berhasil didamaikan pada pukul 03.00 dini hari dan warga tidak mempermasalahkan penyerangan tersebut.⁵⁸ Bermula dari pemukulan yang dilakukan oleh preman penjaga tempat judi terhadap warga Ketapang ini kemudian berkembang menjadi konflik komunal yang menyebabkan pecahnya Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat Tahun 1998. Sikap dalam konflik ini melibatkan persepsi, prasangka, dan cara pandang pihak-pihak yang terlibat. Dalam Peristiwa Ketapang, sikap yang berkembang di kedua belah pihak semakin memperkeruh konflik. Adanya prasangka antar kelompok menjadi salah satu sikap dalam konflik ini. Masyarakat Ketapang memandang kelompok preman sebagai pengganggu yang tidak hanya menciptakan masalah sosial melalui perjudian tetapi juga merusak ketentraman lingkungan. Di sisi lain, kelompok preman yang menjaga tempat perjudian memandang warga lokal sebagai ancaman terhadap mata pencaharian mereka. Tak hanya itu, adanya provokasi berbasis SARA menjadi gambaran sikap dalam konflik komunal pada Peristiwa Ketapang. Isu agama turut mempengaruhi sikap para pihak yang terlibat. Peristiwa ini berkembang menjadi kerusuhan yang bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), karena adanya isu pembakaran rumah ibadah yang memicu kemarahan lebih luas dari masyarakat Muslim yang tidak hanya di Ketapang tetapi di berbagai wilayah sekitarnya. Persepsi ini memperdalam segregasi antar kelompok dan menimbulkan permusuhan yang lebih tajam.

Munculnya isu pembakaran masjid menjadi salah satu elemen penting yang memperkeruh situasi konflik saat itu. Isu pembakaran masjid muncul ketika kelompok preman yang terlibat konflik menyerang ke wilayah perkampungan Ketapang. Masjid yang diisukan telah dibakar ini terletak di Jalan Pembangunan I Dalam, yaitu Masjid Khairil Biqa. Setelah terjadinya perselisihan yang menimbulkan perkelahian oleh salah seorang warga Ketapang dengan para preman penjaga tempat perjudian Mickey Mouse Enko. Konflik ini pun kemudian dimulai dengan serangan kelompok preman terhadap warga Ketapang. Kelompok preman melakukan penyerangan ke perkampungan padat di belakang pusat pertokoan Plaza Gajah Mada, dekat sentra bisnis kawasan kota yang dikenal dengan kawasan Ketapang.⁵⁹

⁵⁷ Eva, Wawancara "Awal Mula Terjadinya Konflik Komunal Pada Peristiwa Ketapang," 27 Juli 2024.

⁵⁸ Rizki Ridyasmara Ridyasmara dan M. Lili NA, "Kronologi Tragedi Ketapang," *Majalah Sabili*, 9 Desember 1998.

⁵⁹ "Api Bermula dari Ketapang," *Tempo*, 23 November 1998.



Gambar 2 Masjid Khairil Biqa di Ketapang yang Diserang Oleh Para Preman Penjaga Tempat Perjudian

Sumber: Dokumentasi Tempo, 1998

Penyerangan tersebut bermula dari para preman yang memasuki Jalan Pembangunan I Dalam dan berusaha menyerang para warga. Penyerangan tersebut memicu kepanikan warga sekitar. Beberapa warga yang berusaha menyelamatkan diri berlindung di dalam Masjid Khairil Biqa. Dalam aksi kekerasan ini, para preman yang melihat warga berlindung di dalam masjid segera menghancurkan kaca-kaca Masjid Khairil Biqa. Sebuah motor yang terparkir di depan masjid bahkan dibakar oleh para preman dan menyebabkan kepulan asap yang terlihat oleh masyarakat sekitar. Asap dari motor yang terbakar dan kerusakan pada masjid menyebabkan munculnya isu bahwa Masjid Khairil Biqa telah dibakar. Isu ini diperkuat oleh suasana emosional dan persepsi masyarakat pada saat itu.

Warga yang tinggal di sekitar Masjid Khairil Biqa mengutarakan preman-preman berbekal samurai dan tanda pengenal warna merah kuning, mereka mengobrak-abrik warga Ketapang, memecahkan kaca-kaca rumah dan masjid, merusak pagar, membakar sepeda motor yang terparkir di depan masjid, bahkan mengejar dan membat siapa saja. Celakanya, aksi teror itu disertai semburat kata-kata yang memancing emosi, "Mana orang-orang Betawi, mana orang-orang Islam, biar kita bantai! Gua haus darah," "Ayo keluar semua, kalau nggak gua bakar masjid ini." Para preman ini menyerang para warga laki-laki secara membabi buta.⁶⁰ Setelah mendobrak jendela, kawanan orang Ambon tadi merusak kaca beberapa rumah penduduk dan kaca jendela Masjid Khairil Biqa. Mereka juga membakar sepeda motor Yamaha *Force 1* yang diparkir di depan masjid.⁶¹ Warga muslim di wilayah tersebut, tidak menduga bakal diserang, sehingga banyak yang jadi korban. Tercatat 2 warga mengalami kritis dan puluhan luka-luka.⁶²

Isu mengenai pembakaran masjid ini pun memicu kemarahan masyarakat di wilayah Jakarta. Kemarahan ini akibatnya mendorong mobilisasi massa yang memperluas skala konflik, sehingga terjadilah konflik komunal pada peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat tahun 1998. Dalam situasi kacau, kepulan asap dan kerusakan seringkali diasosiasikan dengan pembakaran. Informasi mengenai pembakaran masjid ini dengan cepat menyebar ke masyarakat luas, termasuk ke kelompok-kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI).⁶³ K.H. Al Habib Al Riziq Shihab yang malam sebelumnya baru saja menjadi penceramah dalam acara Tabligh Isra Mi'raj yang diselenggarakan di Masjid Khairil Biqa,

⁶⁰ Eva, Wawancara "Kronologi Konflik Komunal Pada Peristiwa Ketapang," 27 Juli 2024.

⁶¹ "Bosnya Belum Tertangkap," *Tabloid Mingguan Adil*, 8 Desember 1998.

⁶² Forum Kerukunan Warga Ketapang, "Kronologi Peristiwa Ketapang," 22 November 1998.

⁶³ Eva, Wawancara "Awal Mula Terjadinya Konflik Komunal Pada Peristiwa Ketapang," 27 Juli 2024.

Ketapang, Jakarta Pusat pun mengetahui penyerangan tersebut. Beliau yang pada saat itu menjadi pemimpin dari organisasi Front Pembela Islam (FPI) menghubungi para anggotanya untuk membantu para warga Ketapang. H. Tubagus Muhammad Sidik. AR, seorang Ketua Badan dan Intelijen Front Pembela Islam (BI-FPI) dengan membawa para anggota-anggota FPI pun bergegas untuk membantu para warga Ketapang dalam melakukan perlawanan terhadap para preman yang menyerang warga, masjid, serta rumah-rumah yang ada di kawasan Ketapang. Warga Ketapang dan para anggota FPI berhasil menangkap seorang preman bernama Tahan Manahan Simatupang. Preman yang tertangkap ini kemudian diinterogasi dan ia mengungkapkan bahwa tanda di lengan para preman yang berupa kain berwarna merah dan kuning ini memiliki arti. Warna merah berarti berani dan warna kuning artinya siap mati. "Jadi kamu dan kawan-kawanmu itu semacam pasukan berani mati begitu!". Tahan pun mengiyakan. Pada saat diinterogasi Tahan juga mengaku bahwa dia dibayar Rp 40.000 per hari untuk meneror umat Islam. Akan tetapi, hal ini sukar dibuktikan kebenarannya, karena terlebih setelah Tahan dibunuh secara mengenaskan oleh massa.⁶⁴

Kemudian pada pukul 08.00 Warga muslim Ketapang dan sekitarnya, mulai berkumpul di Gajah Mada. Mereka bermaksud mengusir para preman dan menuntut ditutupnya tempat-tempat perjudian dan pelacuran yang selama ini menjadi sarang para preman.⁶⁵ Jumlah massa semakin bertambah pada pukul 09.00 WIB setelah tersiar isu bahwa Masjid Khairul Biqa telah dibakar, sedangkan hal yang sebenarnya terbakar adalah motor milik warga yang terparkir di depan Masjid Khairil Biqa. Sejumlah orang datang dari lokasi-lokasi yang jauh letaknya dari daerah Ketapang, seperti Tanjung Priok, Tanah Abang, dan Tangerang.⁶⁶



Gambar 3 Gedung Perjudian yang Dibakar Oleh Massa

Sumber: Dokumentasi Tempo, 1998

Pukul 11.00 warga Ketapang bercampur dengan massa yang berasal dari berbagai daerah menguber para preman. Perusakan masjid menyulut kemarahan warga. Mereka pun bahu-membahu mengusir para preman dengan senjata ala kadarnya. Seperti pedang, celurit, keris, atau samurai. Massa berhasil mendesak preman mundur ke arena perjudian "Mickey Mouse". Sebagian lari kocar-kacir.⁶⁷ Para preman bersembunyi di gedung Gajah Mada Plaza. Warga meminta aparat mengevakuasi para preman, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya. Warga marah, lalu membakar salah satu tempat bilyard yang menjadi persembunyian sebagian preman. Kebetulan tempat bilyard

⁶⁴ H. Tubagus Muhammad Sidik. AR, "Keterlibatan FPI Dalam Peristiwa Ketapang," 30 Juni 2024.

⁶⁵ Forum Kerukunan Warga Ketapang, "Kronologi Peristiwa Ketapang," 22 November 1998.

⁶⁶ Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam di Indonesia* (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), 534.

⁶⁷ "Massa Desak Mundur Preman Ke Arena Perjudian," *Jawa Pos*, 23 November 1998.

inbi berdekatan dengan gereja Ketapang. Gereja pun turut terbakar. Para preman yang berhamburan keluar, dihajar warga. Akibatnya, 10 diantaranya tewas.⁶⁸

Anehnya, para preman yang dikejar larinya lincah sekali ke atas gedung. Sangat terlatih. “Mirip gerakannya ninja,”. Hal tersebut membuat beberapa orang mencurigai adanya hubungan ‘preman-preman terlatih’ tersebut dengan adanya ninja-ninja di Banyuwangi beberapa waktu lalu. Didorong oleh kemarahan yang memuncak, entah siapa yang memulai, akhirnya gedung itu dibakar.⁶⁹ Sekitar pukul 12.00 WIB amuk massa mulai mereda. Mobil pemadam kebakaran sibuk memadamkan bangunan yang dibakar massa. Ribuan pasukan gabungan di drop di kawasan Gajah Mada Plaza. Beberapa jalan, Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan sekitarnya ditutup total. Massa belum puas. Mereka mengira 150 preman yang dievakuasi petugas, selebihnya masih berkeliaran dan bersembunyi di gedung-gedung sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Hal itu karena dikhawatirkan akan terjadi serangan balik terhadap warga secara tak terduga, mereka meminta preman dibersihkan. Itulah sebabnya, warga tidak bisa menerima. Dengan meneriakkan *Allahu Akbar, Lailahailallah*, massa yang membawa celurit, pedang, samurai meminta aparat membersihkan kawasan itu dari preman sambil duduk-duduk di depan Gajah Mada Plaza.⁷⁰



Gambar 4 Para Ulama yang Sedang Menenangkan Massa
Sumber: Dokumentasi Tempo, 1998

Memasuki pukul 12.15, sekitar 20 Kyai, termasuk K.H. Al Habib Al Riziq Shihab, datang menenangkan massa di Jalan Gajah Mada. Mereka lalu bernegosiasi dengan Bapak Hendarji (Kodam) dan Bapak Bambang (Polres).⁷¹ “Kami tidak mau mereka berkeliaran di sini. Ini daerah perdagangan penting. Kalau rusuh, masyarakat ikut dirugikan. Kalau mereka tetap berada di sini, amarah masyarakat tidak akan terbendung,” kata Habib mengingatkan petugas. Tapi tampaknya aspirasi para Kyai agar para preman dievakuasi secepatnya, tidak mendapat tanggapan. Habib pun meminta kepada massa tidak gampang terprovokasi, merusak tempat ibadah, menganiaya warga keturunan, atau pertokoan.⁷² Lalu, pada pukul 12.30-17.00, meski kecewa dengan aparat, para Kyai bertahan untuk menenangkan massa. Pada saat itu, situasi di Jalan Gajah Mada terkendali. Tidak ada pembakaran, tidak ada penyerangan. Pada pukul 17.00 karena merasa tidak digubris, K.H. Al Habib Al Riziq Shihab memutuskan untuk pulang ke

⁶⁸ Forum Kerukunan Warga Ketapang, “Kronologi Peristiwa Ketapang,” 22 November 1998.

⁶⁹ Rizki Ridyasmara Ridyasmara dan M. Lili NA, “Tragedi Ketapang: SARA Lagi DARAH Lagi, Sampai Kapan...?,” *Majalah Sabili*, 9 Desember 1998.

⁷⁰ “Massa Desak Mundur Preman Ke Arena Perjudian,” *Jawa Pos*, 23 November 1998.

⁷¹ Forum Kerukunan Warga Ketapang, “Kronologi Peristiwa Ketapang,” 22 November 1998.

⁷² “Massa Desak Mundur Preman Ke Arena Perjudian,” *Jawa Pos*, 23 November 1998.

rumahnya. Bapak Kaharuddin dari kesatuan Marinir, mencoba menahan beliau karena takut massa akan bergejolak kembali. Semakin banyaknya massa yang berdatangan tidak dapat tertahan, sehingga para massa tersebut membakar Gereja Santa Maria dan Santa Ursula. Para Kyai dan warga Muslim Ketapang pun tidak tahu-menahu soal pembakaran ini.⁷³ Dapat dilihat dari kronologis konflik komunal pada Peristiwa Ketapang, terasa sekali ada kejanggalan. Seharusnya pihak keamanan dapat mengantisipasi atau setidaknya melakukan tindakan berjaga-jaga di sekitar daerah Ketapang, sesaat setelah adanya tindakan brutal para preman terhadap Irfan dan ayahnya itu. Jika itu dilakukan, maka besar kemungkinan, serangan fajar yang dilakukan para preman di atas bisa sedikit banyak dicegah.⁷⁴

Dampak dan Upaya Penyelesaian Konflik Komunal Pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat Tahun 1998

Perilaku dalam konflik ini terlihat dari tindakan-tindakan fisik yang mencerminkan eskalasi konflik secara langsung, seperti kekerasan fisik. Konflik di Ketapang ditandai oleh serangan fisik antara warga dan kelompok preman. Pada awalnya, konflik ini dipicu oleh insiden pemukulan terhadap seorang pemuda lokal oleh kelompok preman. Insiden ini memicu reaksi warga yang memutuskan untuk melakukan serangan balik, sehingga terjadi bentrokan besar yang melibatkan kekerasan fisik dan pembakaran properti. Selanjutnya berkembang menjadi pembalasan dan eskalasi. Setelah insiden awal, kerusuhan di Ketapang berkembang menjadi konflik komunal yang melibatkan ribuan massa. Serangan fisik menjadi semakin intens, termasuk pembakaran tempat perjudian dan bentrokan besar yang melibatkan senjata tajam. Dampak yang diakibatkan oleh konflik komunal pada Peristiwa Ketapang ini meliputi tiga hal, yaitu dampak fisik, dampak psikologis, serta dampak sosiologis bagi para pihak yang terlibat.

Dampak fisik dari Peristiwa Ketapang 1998 terjadi pada 22 November 1998 di kawasan belakang Plaza Gajah Mada, sedikitnya enam preman meninggal dan tiga orang mengalami luka bacok pada awal mula Peristiwa Ketapang ini terjadi. Dandim 0501 Jakpus, Letkol S Widodo dan ajudannya, Sutimin, termasuk di antara ketiga korban luka bacok itu. Salah satu preman yang tewas dan dapat diidentifikasi bernama Tahan Manahan Simatupang (22) yang tinggal di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara lima korban tewas lainnya belum diketahui identitasnya.⁷⁵ Keesokan harinya di tanggal 23 November 1998, jumlah korban tewas akibat konflik komunal yang terjadi pada Peristiwa Ketapang menjadi 13 orang, setelah 7 mayat terakhir ditemukan dalam reruntuhan bekas kebakaran bangunan tempat perjudian di Jalan K.H. Zainul Arifin No. 11, Jakarta Pusat. Evakuasi mayat ketujuh korban terakhir ini dipimpin langsung oleh Kasat Serse Polres Jakarta Pusat, Mayor Pol. Drs. Budiono Sandy. Sekitar pukul 10.00 WIB ditemukan empat mayat di lantai I dan tiga mayat di lantai II. Kondisi korban dalam keadaan terbakar, namun 6 mayat berhasil diidentifikasi masing-masing bernama Agus, Jemi, Antoni, Hermawan, Jusuf, Rendi dan satu lagi tidak dapat dikenali.⁷⁶

Korban luka-luka yang dibawa ke RS Hasada sebanyak sembilan orang. Enam orang sudah pulang dan dua masih dalam perawatan. Satu diantaranya bernama Encep Badjoeri warga Rawabebek dan Moh. Taufik (15) warga Pejagalan IV RT 008/05, Tambora

⁷³ Forum Kerukunan Warga Ketapang, "Kronologi Peristiwa Ketapang," 22 November 1998.

⁷⁴ Rizki Ridyasmara Ridyasmara dan M. Lili NA, "Tragedi Ketapang: SARA Lagi DARAH Lagi, Sampai Kapan...?," *Majalah Sabili*, 9 Desember 1998.

⁷⁵ "Preman-Warga Bentrok, 6 Tewas," *Jawa Pos*, 23 November, 1998.

⁷⁶ "Kerusuhan Ketapang 13 Tewas, 11 Gereja Dibakar Dan Dirusak," *Suara Pembaruan*, 22 November 1998.

yang terkena tembakan. Taufik akhirnya dipindah ke RSCM. Korban yang ditemukan sekarat di depan tempat perjudian bernama Erry (30) hingga Senin pagi masih dalam keadaan tidak sadarkan diri di RSCM, akibat luka bacok di kepala. Korban lain berdasarkan data di IGD, Siti Khodijah (20) warga Tambora RT 003/04, Jakbar dan Moh. Salam (16) warga Pademangan Timur RT 008/15 yang terkena tembakan, namun telah pulang.⁷⁷

Selain mengakibatkan adanya korban jiwa, konflik komunal pada Peristiwa Ketapang ini juga mengakibatkan adanya kerusakan material. Berdasarkan narasumber di Kantor Ketentraman dan Ketertiban Pemda DKI Jakarta pada 24 November 1998, kerugian kasus Ketapang mencapai Rp 9 miliar.⁷⁸ Pemerintah mencatat kerugian materil sebanyak 16 gereja dirusak/dibakar, 1 masjid dirusak, 8 hotel/restoran dirusak, 15 bank dirusak, 3 sekolah dirusak, 32 mobil dirusak/dibakar, 3 motor dibakar, 1 kantor koramil dirusak, 7 rumah warga dirusak, 1 pompa bensin dirusak, dan 6 kantor pemerintah dirusak.⁷⁹

Dampak psikologis konflik komunal yang terjadi pada Peristiwa Ketapang yang mencekam di Jakarta Pusat tahun 1998 ini telah meninggalkan luka dalam pada warga yang tinggal di lokasi berdarah itu. Isu balas dendam dan ancaman pembakaran "*bumi hangus*" masih menghantui warga. Akibatnya, aktivitas sehari-hari penduduk ikut terganggu. Malam mereka begadang, pagi terpaksa tidak bekerja. Toko dan warung tidak berani berjualan. Salah satu hal yang memprihatinkan banyak anak sekolah yang membolos karena trauma. Mereka khawatir akan ada aksi balas dendam dari para preman. Rasa khawatir dan takut itu diperparah ketika para anak-anak melihat banyak berita bentrokan yang ditayangkan televisi.⁸⁰ Oleh karenanya, banyak anak-anak yang memutuskan untuk tidak sekolah dikarenakan adanya trauma akibat peristiwa tersebut. Akibat trauma yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut menyebabkan banyak warga Ketapang yang memutuskan untuk mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman, seperti rumah sanak saudara yang lokasinya jauh dari tempat kejadian. Pada saat itu, warga yang mengungsi didominasi oleh anak-anak, para perempuan dan pemuda-pemudi lainnya, sedangkan warga-warga yang memang sudah memasuki usia lanjut dan para perangkat kampung seperti RT, RW, serta staf kelurahan Petojo Utara memutuskan untuk tetap tinggal di kediaman mereka guna menjaga wilayah Ketapang.⁸¹ Pada akhirnya, setelah beberapa minggu pasca kejadian mulai banyak warga-warga yang kembali lagi ke kediaman mereka pada tahun 1998. Hingga kini setelah Peristiwa Ketapang telah berlalu selama bertahun-tahun trauma tersebut masih dirasakan oleh warga Ketapang. Apabila ada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan suku tertentu seperti Ambon, warga menjadi lebih khawatir dan sensitif akan kejadian-kejadian yang melibatkan orang-orang tersebut karena takut akan terulang terjadinya kejadian yang sama seperti sebelumnya.⁸²

Dampak sosial dan ekonomi dari peristiwa ini secara umum situasi sehari setelah kerusuhan Ketapang, tampak normal. Sementara berbagai isu akan adanya kerusuhan terus menghantui warga Jakarta. Salah satu di antaranya adalah isu adanya sekelompok orang yang melakukan pemeriksaan kartu tanda penduduk (KTP) di sejumlah tempat yang ternyata tidak benar. Kabar lain yang menyebar adalah, adanya sekelompok massa

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ "Kerugian Kasus Ketapang Rp 9 Miliar," *Berita Buana*, 25 November 1998.

⁷⁹ Departemen Pertahanan dan Ketahanan, *Berbagai Peristiwa Dan Penanganannya 1998-1999: Penculikan Trisakti, Semanggi, Ambon, Ketapang, Kupang, Banyuwangi, Sambas, Ciamis, Aceh* (Jakarta: Pusat Penerangan TNI, 1999), 37.

⁸⁰ "Insiden Ketapang: Awalnya Ulah Preman, Akhirnya Warga Mengamuk (2)," *Jawa Pos*, 27 November 1998.

⁸¹ Eva, Wawancara "Warga Trauma Pasca Peristiwa Ketapang," 27 Juli, 2024.

⁸² Jhohan, Wawancara "Dampak Psikologis Warga Ketapang," 5 Agustus 2024.

yang katanya sudah membawa kelewang dan senjata tajam lainnya di sekitar Senen.⁸³ Nyatanya, kabar tersebut hanyalah isu belaka. Konflik komunal yang terjadi pada Peristiwa Ketapang ini telah memecah belah hubungan antar komunitas, menciptakan jarak sosial yang lebih dalam antara kelompok etnis dan agama yang terlibat, yaitu etnis Ambon, agama Islam, dan agama Kristen. Ketidakpercayaan dan ketegangan antar kelompok menyebabkan rusaknya solidaritas sosial yang sebelumnya ada.

Sebelum terjadinya Peristiwa Ketapang, warga di daerah Ketapang hidup saling berdampingan. Warga daerah Ketapang, Jakarta Pusat ini memiliki tradisi yang pasti berulang setiap perayaan hari-hari besar agama, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Para warga Ketapang biasa untuk bersilaturahmi ke rumah tetangga-tetangga yang sedang merayakan hari besar agamanya. Bukti lain dari kehidupan beragama yang rukun di antara warga Ketapang adalah berdirinya sebuah kelenteng kecil di Jalan Petojo Utara III. Kelenteng atau rumah *toapekong* itu resminya bernama Vihara Bhakti Suci. Vihara ini sudah berdiri sejak tahun 1960-an. Warga beragama Konghucu, Wong Fung Lim menuturkan bahwa sejak ia tinggal di Ketapang sejak 15 tahun yang lalu, para penganut agama Konghucu ini tidak pernah mendapat gangguan dari mana dan siapa pun.⁸⁴ Hal ini menjadi bukti bahwa di Ketapang, masalah SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) sudah lama selesai. Sampai meledaknya Peristiwa Ketapang, pada Minggu 22 November 1998, belum pernah ada yang mengusik rumah-rumah ibadah itu.

Warga Ketapang juga merasakan dampak dari segi ekonomi akibat dari terjadinya Peristiwa Ketapang ini. Kegiatan perdagangan dan bisnis di wilayah Ketapang terganggu, terutama karena ketakutan akan kerusuhan yang berulang, serta rusaknya infrastruktur yang dibakar atau dirusak. Hal ini menyebabkan hilangnya mata pencaharian bagi banyak warga dan memperlambat pemulihan ekonomi di daerah yang terdampak konflik. Beberapa toko dan tempat usaha sudah mulai buka dan melakukan kegiatan ekonomi seperti biasa, akan tetapi sejumlah pertokoan lain terutama di sekitar Pecenongan memang terlihat masih tutup. Puluhan warung yang berdekatan di sepanjang Jalan K.H. Zainul Arifin masih tampak tutup. Kalaupun ada yang buka hanya satu dua. Padahal, sebelum Peristiwa Ketapang terjadi warung-warung tersebut buka selama 24 jam.⁸⁵

Upaya penyelesaian dalam konflik komunal pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat tahun 1998 berbagai pihak berupaya mencari solusi untuk meredakan ketegangan dan memulihkan keamanan. Pemerintah, tokoh masyarakat, serta elemen sipil terlibat dalam serangkaian langkah penyelesaian konflik, mulai dari mediasi antar kelompok hingga program rekonsiliasi jangka panjang. Upaya-upaya ini bertujuan tidak hanya menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung, namun juga membangun fondasi perdamaian yang lebih kokoh di tengah masyarakat Jakarta yang majemuk. Upaya pertama dilakukan oleh warga Ketapang dan para tokoh agama. Sebagai upaya penyelesaian konflik komunal Pada Peristiwa Ketapang, dibuatlah pertemuan di Masjid Khairil Biqa oleh warga malam hari pasca kejadian. Warga RW 01 Petojo Utara, Jakarta Pusat bersepakat melupakan "Insiden Ketapang" dan mengubur dendam untuk merangkai kembali persatuan dan kesatuan. Kesepakatan itu dicetuskan dalam pertemuan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dengan Wakil Gubernur bidang Kesra, Dr. H. Djaelani. Kesepakatan warga dibacakan Ketua RW 01 Muchtar

⁸³ "Jakarta Nornal, Penuh Isu," *Kompas*, 24 November 1998.

⁸⁴ "Ketapang Beragam Etnik Yang Menyatu," *Kompas*, 4 Desember 1998.

⁸⁵ "Ratusan Telepon Tanya Kabar Kampung," *Jawa Pos*, 27 November 1998.

Wigana. Hadir dalam acara silaturahmi itu Pengurus Masjid Khairil Biqa, H. Maulana Sani, Pendeta Pumala Setiabrata dari Gereja Kristus yang terbakar, Pendeta Sonny dari Gereja Pantekosta, beserta unsur pemuda diwakili Babai Sobari.⁸⁶ Warga seperti yang diungkapkan Ketua RW menganggap Peristiwa Ketapang sebagai musibah. Warga sangat menyesal kejadian itu sampai menimbulkan kerugian harta dan korban jiwa. Di bagian lain pernyataannya, warga tidak setuju kejadian itu dikaitkan dengan SARA karena perusakan dan pembakaran bukan dilakukan warga Petojo Utara.⁸⁷ Pada akhirnya konflik komunal yang terjadi pun berujung pada perdamaian yang akan terus berlangsung hingga saat ini.

Pemerintah juga berperan penting dalam mengupayakan penyelesaian konflik komunal pada Peristiwa Ketapang. Pangdam Jaya Mayjen TNI Djadja Suparman menyatakan situasi Ketapang pada sore hari di tanggal 22 November 1998 sudah dapat dikendalikan setelah ribuan aparat diturunkan ke sejumlah tempat. Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Gunung Sahari, dan Jalan Pasar Baru untuk sementara ditutup. Pangdam meminta masyarakat jangan cepat terpancing isu apapun juga, terutama yang bersifat mengadu domba dan memecah belah persatuan.⁸⁸ Adapun upaya penyelesaian konflik komunal pada Peristiwa Ketapang di Jakarta Pusat tahun 1998 yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penangkapan tersangka dan memulangkan preman Ambon di Jakarta oleh Pemda DKI Jakarta. Aparat mengevakuasi 159 warga Ambon ke markas Brimob Kelapa Dua, mengamankan sentra-sentra ekonomi, gereja-gereja dan beberapa Universitas Kristen. Hasil pengembangan penyidikan telah ditangkap 2 kelompok pelaku pengrusakan dan penganiayaan serta 3 orang di antaranya diklasifikasikan sebagai provokator, serta 5 orang diidentifikasi sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Sementara barang bukti yang berhasil disita berupa 17 buah samurai, 3 buah golok, 3 buah potongan besi pipa runcing dan 3 buah alat pemukul softball.⁸⁹

Pada 30 November 1998, warga Ketapang dan Himpunan Masyarakat Maluku Indonesia (HMMI), berdamai di Polda Metro Jaya. Kedua belah pihak sepakat melupakan 'Insiden Ketapang' dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan 13 tewas dan belasan rumah ibadah rusak serta terbakar. Perdamaian kedua belah pihak dijembatani pihak Polda Metro Jaya, diikuti 15 wakil warga Ketapang dipimpin Abdul Azis Moch Damar SH serta belasan orang HMMI dipimpin ketua HMMI Isaac Sairlela dan disertai Ny Mietje Djailani Saimima, Martha Cristina Tiahahu, Semmy Matulesy SH serta beberapa ketua organisasi Maluku lainnya. Abdul Azis usai pertemuan menjelaskan kedua belah pihak menerima semua keadaan itu dengan ikhlas. Dia mengharapkan warga sekitar Ketapang, warga Maluku serta warga Ibu kota umumnya sama-sama mengambil hikmahnya.⁹⁰ Selain itu baik dari pihak warga Ketapang dan Maluku tidak menginginkan kejadian ini dijadikan sebagai masalah SARA karena bukan itu permasalahannya. Semua pihak berharap untuk selalu menjaga ketertiban, persatuan, dan kesatuan bangsa. Kemudian setelah terjadinya perjanjian damai antara pihak-pihak yang terlibat, sebanyak 159 preman Ambon yang dievakuasi ke markas Brimob di Kelapa Dua, Depok dipulangkan kembali ke Ambon oleh Pemda DKI Jakarta dengan kapal laut pada 14 Desember 1998.⁹¹

⁸⁶ "Warga Ketapang Berdamai, Pemda Bantu Korban Insiden," *Media Indonesia*, 28 November 1998.

⁸⁷ Jhohan, Wawancara "Upaya Penyelesaian Konflik," 5 Agustus 2024.

⁸⁸ "Enam Orang Tewas Tujuh Gereja Dibakar, Jakarta Pusat Rusuh," *Media Indonesia*, 23 November 1998.

⁸⁹ Departemen Pertahanan dan Ketahanan, *Berbagai Peristiwa Dan Penanganannya 1998-1999: Penculikan Trisakti, Semanggi, Ambon, Ketapang, Kupang, Banyuwangi, Sambas, Ciamis, Aceh* (Jakarta: Pusat Penerangan TNI, 1999), 38.

⁹⁰ "Warga Ketapang-Maluku Berdamai," *Media Indonesia*, 1 Desember 1998.

⁹¹ Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam di Indonesia* (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), 535.

Selain itu, menanggapi permintaan DPRD DKI Jakarta dan mahasiswa serta sebagai upaya agar Peristiwa Ketapang tidak terulang kembali, semua tempat hiburan yang disalahgunakan menjadi prostitusi terselubung dan arena perjudian sudah tutup sejak Jum'at 27 November 1998. Dalam catatan Tramtib DKI Jakarta, tempat hiburan yang ditutup sebanyak 194 lokasi panti pijat dan 145 tempat permainan bola tangkas yang tersebar di lima wilayah kota madya. Penutupan dilakukan atas imbauan Gubernur DKI Sutiyoso dalam pertemuan Kamis 26 November 1998 dengan para pengusaha panti pijat, bola tangkas, dan tempat hiburan.⁹² Menurut catatan *Kompas*, jumlah diskotik, karaoke, panti pijat, bola tangkas, biliar, dan bar di Jakarta berjumlah sekitar 800 buah. Tempat-tempat hiburan itu umumnya terkonsentrasi di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.⁹³

4. Penutup

Temuan-temuan pada artikel ini menggarisbawahi kompleksitas konflik komunal yang terjadi di Peristiwa Ketapang 1998, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, tetapi juga oleh dinamika politik dan kebijakan pemerintah pada masa Reformasi. Frustrasi sosial yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia mencerminkan akumulasi kekecewaan, ketidakpuasan, dan kemarahan masyarakat terhadap berbagai kondisi buruk yang dihadapi selama bertahun-tahun. Di tengah kondisi tersebut, budaya kekerasan yang berkembang dan lemahnya penegakan hukum menambah rasa tidak aman di masyarakat. Kekerasan menjadi hal yang lazim, baik dalam bentuk konflik horizontal seperti kerusuhan komunal maupun kekerasan negara terhadap rakyat. Semua ini menciptakan kondisi psikologis dan sosial yang mendorong masyarakat untuk meluapkan frustrasi melalui protes, demonstrasi, dan terkadang, aksi anarkis. Frustrasi sosial dan kebebasan pers yang terjadi pada masa transisi Reformasi berpengaruh terhadap konflik sosial yang terjadi di Jakarta. Kesimpulannya, peristiwa ini memberikan gambaran bahwa konflik komunal tidak hanya disebabkan oleh perbedaan identitas, tetapi juga oleh ketidakadilan sosial dan ekonomi yang memperkeruh suasana. Oleh karena itu terjadinya Peristiwa Ketapang ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara eksklusif karena ini merupakan fenomena yang terjadi pada tahun 1998.

Daftar Pustaka

Buku

Alkatiri, Zeffry. *Jakarta Punya Cara*. Jakarta: Masup Jakarta, 2012.

Aritonang, Jan S. *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gunung Mulia, 2006.

BPS. *Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta 1998*. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta, 1999.

Budi Permono dkk, Agus. *Peta Konflik Jakarta: Warga, Mahasiswa, Preman, Suku, Negara, Dan Warga*. Jakarta: YAPPIKA, 2004.

⁹² "Perjudian Dan Tempat Maksiat Tutup Serentak," *Media Indonesia*, 1 Desember 1998.

⁹³ "Sebagian Besar Tempat Hiburan Tutup," *Kompas*, 1 Desember 1998.

- CC. Simanjuntak, Maruli. *Preman-Preman Jakarta*. Jakarta: Grafika Indah, 2007.
- Departemen Pertahanan dan Ketahanan. *Berbagai Peristiwa Dan Penanganannya 1998-1999: Penculikan Trisakti, Semanggi, Ambon, Ketapang, Kupang, Banyuwangi, Sambas, Ciamis, Aceh*. Jakarta: Pusat Penerangan TNI, 1999.
- Galtung, Johan. *Studi Perdamaian: Perdamaian Dan Konflik Pembangunan Dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Klinken, Gerry van. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal Dan Demokratisasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Madjid dan Johan Wahyudi, M. Dien. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada, 2014.
- Suparno, Basuki Agus. *Reformasi Dan Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2012.
- Artikel Jurnal*
- Ainun Yafi, Reyhan. "Kebijakan Historis BJ Habibie Berdampak Transformasi Menuju Demokrasi." *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* Vol. 4, No. 2. (2023): 66.
- Azisi, Ali Mursyid. "Studi Komparatif Teori Konflik Johan Galtung Dan Lewis A. Coser." *Jurnal Yaqzan* 7, No. 2 (2021): 224–225.
- Martini, Elsa. "Perkembangan Kota Menurut Parameter Kota Studi Kasus: Wilayah Jakarta Pusat." *Jurnal Planesa* Volume 2, Nomor 2 (November 2, 2011): 131.
- Metalianda. "Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* Vol. 1, No. 1 (2017): 71–86.
- Utami, Nunik Esti. "Nasionalisme Pemersatu Konflik Sosial Di Indonesia (1996-1999)." *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah* Vol. 3, No. 2 (2017): 6.
- Koran*
- Panjaitan, Trimedya. "Insiden Ketapang Dan Runtuhnya Wibawa Hukum." *Berita Buana*, November 30, 1998, sec. Kolom Hukum Trimedya Panjaitan.
- "Amuk SARA Apa Targetnya." *Tempo*, 14 Desember 1998.
- "Daftar Korban Kerusakan Ketapang." *Berita Buana*, November 25, 1998.
- "Enam Orang Tewas Tujuh Gereja Dibakar, Jakarta Pusat Rusuh." *Media Indonesia*, November 23, 1998.
- "Gubernur Sutiyoso: Warga Alami Dekadensi Moral." *Kompas*, November 23, 1998.
- "Insiden Ketapang; Awalnya Ulah Preman, Akhirnya Warga Mengamuk (2)." *Jawa Pos*, November 27, 1998.

- "Jakarta Normal, Penuh Isu." *Kompas*, November 24, 1998.
- "Jakarta 'Tercabik' Oleh Kerusuhan Mei Dan November." *Media Indonesia*, November 30, 1998.
- "Kerugian Kasus Ketapang Rp 9 Miliar." *Berita Buana*, November 25, 1998.
- "Kerusuhan Ketapang 13 Tewas, 11 Gereja Dibakar Dan Dirusak." *Suara Pembaruan*, November 22, 1998.
- "Kerusuhan Melanda Jl. Zainul Abidin, Jakpus." *Suara Pembaruan*, November 22, 1998.
- "Kerusuhan Yang Bernuansa SARA Menunjukkan Pekanya Kondisi Masyarakat." *Kompas*, November 24, 1998.
- "Ketapang Beragam Etnik Yang Menyatu." *Kompas*, Desember 1998.
- "Massa Desak Mundur Preman Ke Arena Perjudian." *Jawa Pos*, November 23, 1998.
- "Mesin Ketangkasan Judi?" *Suara Karya*, Mei 1989.
- "Pemicu Kerusuhan Itu Permainan Berhadiah 'Rokok'." *Berita Buana*, November 25, 1998.
- "Peristiwa Ketapang Sungguh Memprihatinkan." *Suara Pembaruan*, November 23, 1998.
- "Perjudian Dan Tempat Maksiat Tutup Serentak." *Media Indonesia*, Desember 1998.
- "Preman-Warga Bentrok, 6 Tewas." *Jawa Pos*, November 23, 1998.
- "Ratusan Telepon Tanya Kabar Kampung." *Jawa Pos*, November 27, 1998.
- "Sebagian Besar Tempat Hiburan Tutup." *Kompas*, Desember 1998.
- "Tragedi Ketapang SARA Lagi DARAH Lagi Sampai Kapan...?" *Majalah Islam Sabili*, Desember 1998.
- "Warga Ketapang Berdamai, Pemda Bantu Korban Insiden." *Media Indonesia*, November 28, 1998.
- "Warga Ketapang-Maluku Berdamai." *Media Indonesia*, Desember 1998.
- Majalah*
Ridyasmara dan M. Lili NA, Rizki Ridyasmara. "Tragedi Ketapang: SARA Lagi DARAH Lagi, Sampai Kapan...?" *Majalah Sabili*, Desember 1998.
- "Targetnya Hanya Preman Ambon." *Tabloid Mingguan Adil*, 8 Desember 1998.
- Arsip*
ANRI. "Akta Perubahan NV Nederlandsch Indische Gas Maatschappij (NV NIGM) Menjadi NV Overzeesche Gas En Electriciteit Maatschappij (NV OGEM)." Jakarta, Mei 1950.
- Forum Kerukunan Warga Ketapang. "Kronologi Peristiwa Ketapang," November 22, 1998.

Wawancara

- Achmad Djohan. "Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Ketapang," Agustus 2024.
- H. Tubagus Muhammad Sidik. AR. "Keterlibatan FPI Dalam Peristiwa Ketapang," June 30, 2024.
- Eva. "Awal Mula Terjadinya Konflik Komunal Pada Peristiwa Ketapang," July 27, 2024.
- Saefudin. "Sejarah Ketapang," Agustus 2024.

Website

- Data Science, Tempo. "Kerusuhan Ketapang," n.d. Accessed March 1, 2024. <https://www.datatempo.co>.
- Himpunan Mahasiswa Sejarah UNDIP. "22 Tahun Tragedi Semanggi I, Pelanggaran HAM Yang Harus Dituntaskan," n.d. Accessed September 10, 2024. <https://hmsejarah.fib.undip.ac.id/12-tahun-tragedi-semanggi-i-pelanggaran-ham-yang-harus-dituntaskan/>.
- Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaartmaatschappij (KNILM) Fotostudio. "Luchtfoto van Batavia," 1940-1930. <https://collectie.wereldmuseum.nl/#/query/a76b414a-654c-44f2-a4e6-6f12903b825b>.
- N.d. Accessed August 24, 2024. <https://pgn.co.id/tentang-kami>.
- N.d. Accessed August 24, 2024 <https://www.petojoutara.com/content/tentang>.